

BAB II

STUDI BANDING KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN DATI II

2.1. Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi

2.1.1. Deskripsi Wilayah

A. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi secara geografis terletak antara 6° 49' – 7° 25' Lintang Selatan dan 106° 49' – 107° 00' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kabupaten Dati II Bogor
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kabupaten Dati II Lebak dan Samudera Indonesia
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kabupaten Dati II Cianjur

Kondisi geografis tersebut merupakan daerah pantai selatan Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia atau dengan negara tetangga Australia. Hal tersebut memiliki makna yang sangat berarti dalam tatanan keamanan nasional maupun dalam konteks pengembangan sosial ekonomi global dalam rangka memasuki pasar bebas.⁹

Luas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi ± 416.404, 27 Ha atau ± 9,10% dari luas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (± 4.575.163,30 Ha) atau 3,05% dari Luas Pulau Jawa, dibandingkan dengan luas Daerah Kabupaten Dati II se Jawa Barat, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi merupakan daerah terluas di Jawa Barat.

Ditinjau dari aspek pemerintahan, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi di bagi ke dalam 7 wilayah Pembantu Bupati, 30 Kecamatan , 335 Desa dan 3 Kelurahan. Kondisi ini sebagai konsekuensi dari terbitnya PP No.3 Thn 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi, dimana sebanyak 1 Kecamatan dan 18 Desa secara resmi diserahkan ke wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (5 desa dari Kecamatan Sukabumi). Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada gambar berikut ini :

⁹ Sukabumi Mandiri, Pemda Kab. Dati II Sukabumi, 1999, hal 5
Tugas Akhir



Gambar.2.1.Peta Wilayah Kab.Dati II Sukabumi
 Sumber : RUTRK Kab. Sukabumi Thn 1995

Ibukota Daerah Tingkat II Sukabumi terletak di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi yang terletak 95 Km dari Ibukota Propinsi dan 120 Km dari Ibukota Negara.

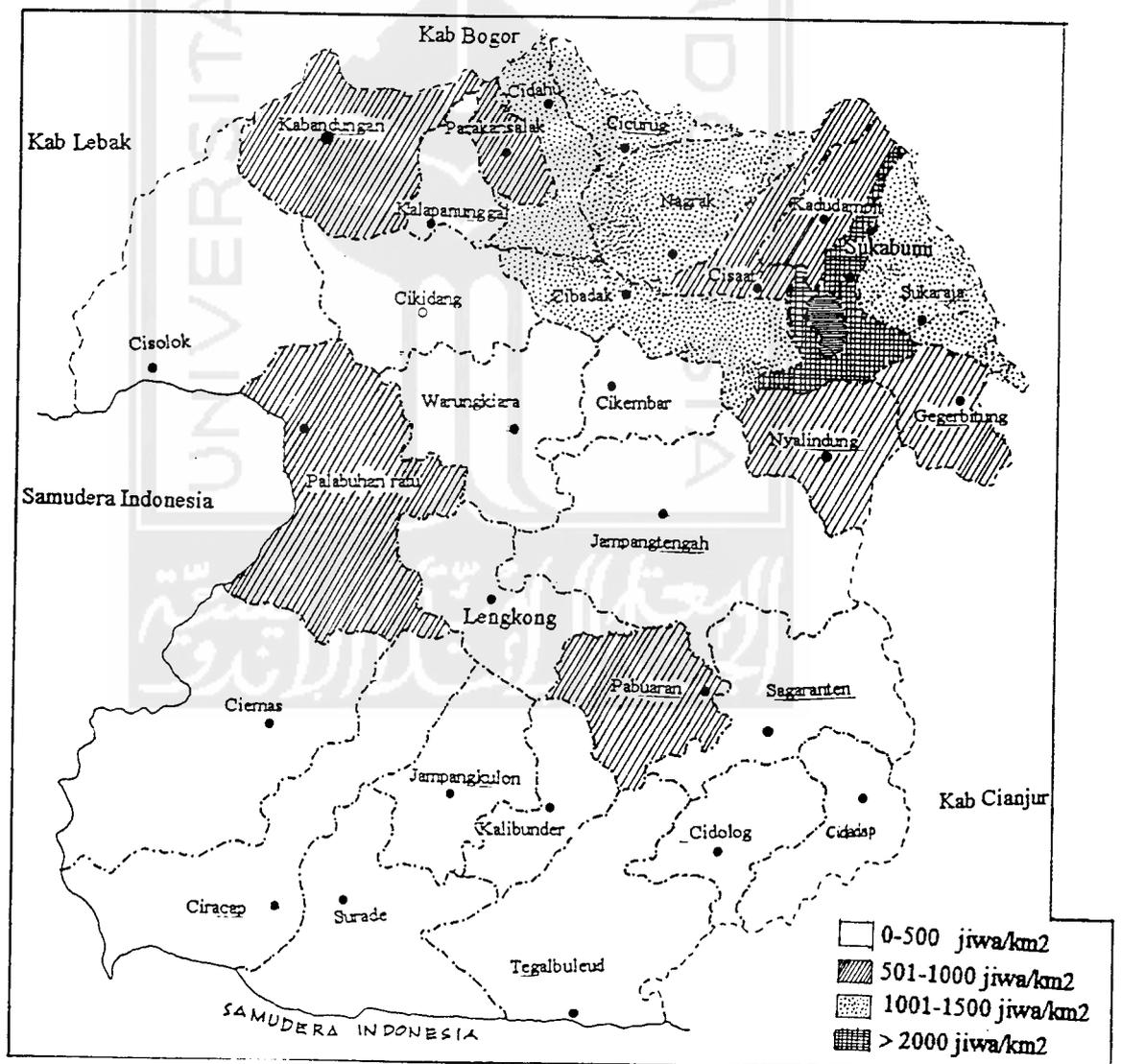
B. Topografi

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi meliputi 40 % merupakan lautan dan 60 % daratan. Bentuk relief daratan yang sangat bervariasi, dari landai di bagian Selatan hingga medan berbukit, bergunung curam di bagian tengah dan Utara. Dengan adanya Gunung Salak dan Gunung Gede, maka ketinggian tanah di Kabupaten Dati II Sukabumi antara 0 – 2.958 m diatas permukaan laut. Sedangkan kondisi kemiringan lahan sangat bervariasi antara 3 % - 35 %.

2.1.2. Kondisi Potensi Sukabumi

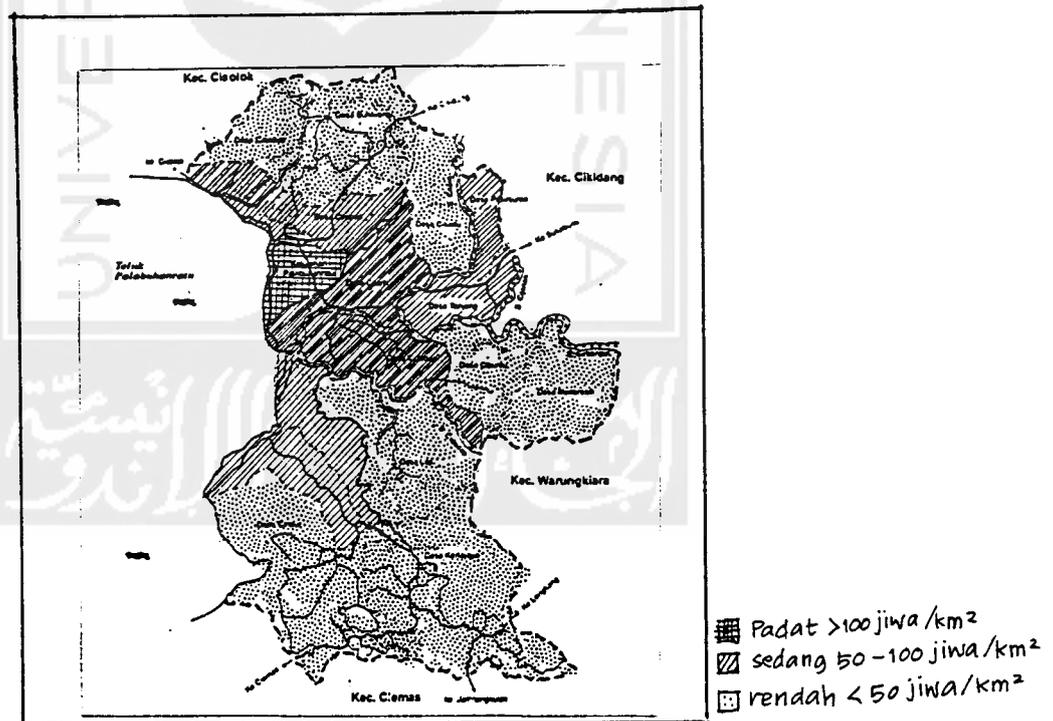
A. Sebaran Penduduk

Penduduk merupakan perhatian yang paling utama dalam mengkaji sumber daya manusia. Karena itu semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan masalah kependudukan. Berdasarkan data tahun 1994/1995, jumlah penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi tercatat 1.752.537 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata adalah 442 jiwa per Km² (dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,18% per tahun) tersebar di 30 Kecamatan. Distribusi penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi tahun 1994/1995 dapat dilihat pada peta berikut ini :



Gambar. 2.2. Peta Sebaran Penduduk Kab. Sukabumi 1995.
Sumber : RUTRK Kab.Sukabumi Thn 1995

Melihat peta penyebaran penduduk yang ada, Kecamatan Sukabumi memiliki kepadatan penduduk tertinggi dan Kecamatan Lengkong memiliki kepadatan penduduk yang paling rendah. Dalam rangka pemerataan pembangunan, maka perlu dikembangkan wilayah yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kota terutama Sukabumi di bagian selatan. Dan Palabuhan Ratu adalah wilayah salah satu Sukabumi yang terletak di bagian Selatan, yang memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi Sub Wilayah Pengembangan I setelah Sukabumi. Kecamatan Palabuhan Ratu memiliki luas wilayah 159,36 Km² dengan jumlah penduduk 106.366 jiwa, tersebar di beberapa desa dan kelurahan, dan penduduk terbanyak berada di kelurahan Palabuhan Ratu. Kelurahan Palabuhan Ratu yang kemudian menjadi kota Palabuhan Ratu (setelah digabung dengan desa Citepus, Cidadap, Citarik) memiliki wilayah 4.729,35 Ha dengan jumlah penduduk 50.299 jiwa dan paling banyak penduduknya berada di kelurahan Palabuhan Ratu.¹⁰ Untuk lebih jelasnya, mengenai Kecamatan dan Kelurahan Palabuhan Ratu dapat dilihat pada peta berikut ini :

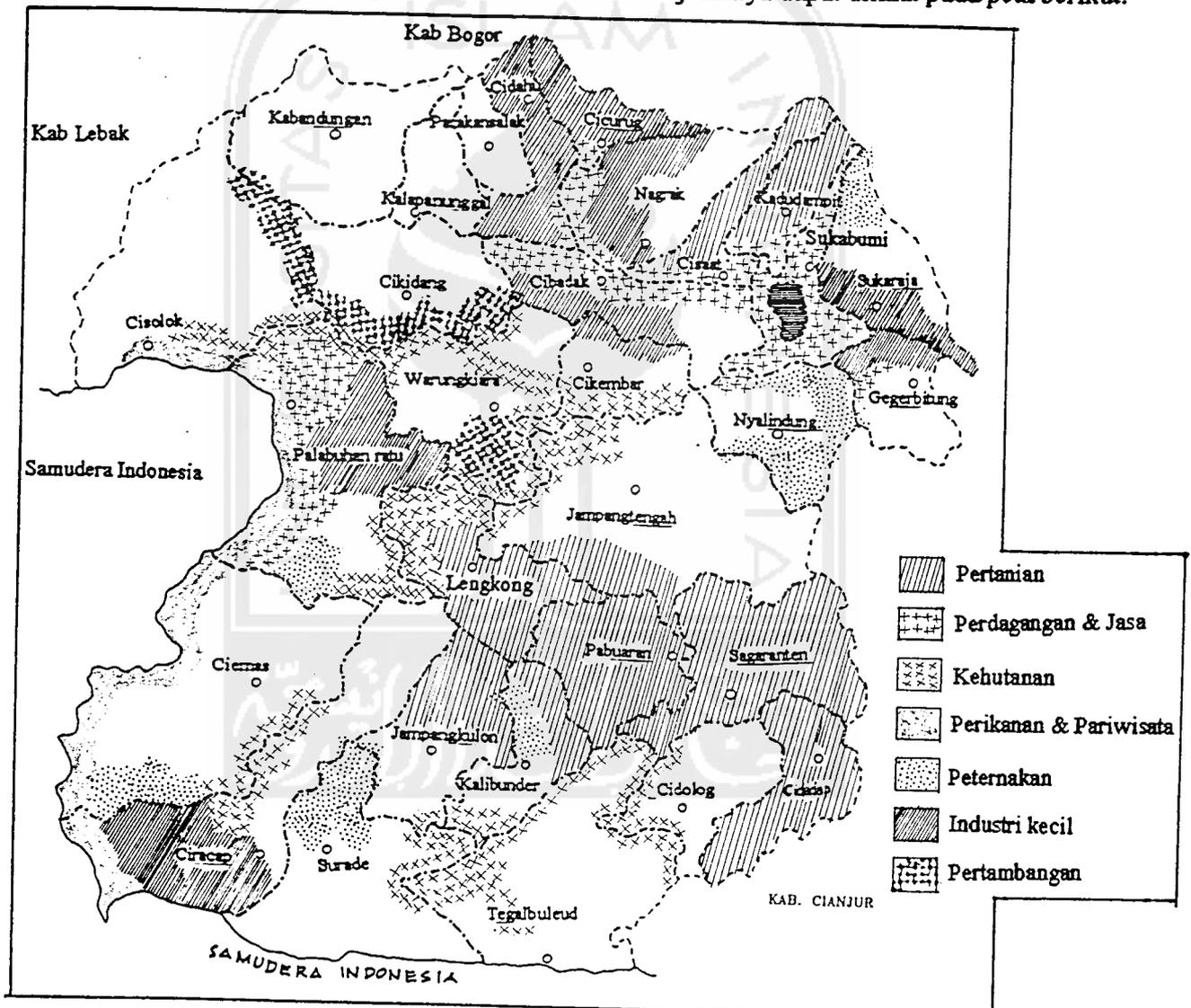


Gambar. 2.3. Peta Sebaran Penduduk Kec. Palabuhan Ratu 1995
 Sumber : Data Potensi Desa dan Monografi Thn 1995.

¹⁰ Buku Sumber Data Potensi Desa dan Monografi Tahun 1995
 Tugas Akhir
 Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Sukabumi

B. Potensi Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan ditunjang oleh 10 sektor, yakni : sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan dan barang galian, industri kerajinan rakyat, perdagangan, transportasi dan jasa. Diantara ke sepuluh sektor tersebut, pemasukan yang paling banyak berasal dari Palabuhan Ratu adalah sektor Kehutanan, Peternakan, Perikanan, Pertambangan dan Barang Galian, Industri Kerajinan Rakyat, Transportasi, Perdagangan dan Jasa.¹¹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta berikut:



Gambar. 2.4. Peta sumber ekonomi kab. Sukabumi, 1995.
Sumber : RUTRK Kab. Sukabumi, Thn 1995

Potensi sumber daya alam yang terdapat di Kota Palabuhan Ratu terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

¹¹ RUTRK Kab. Sukabumi 1995
Tugas Akhir

- Potensi sumber daya alam yang dapat dibudidayakan yaitu berupa hasil pertanian di desa Cidadap dan Citepus, **Perikanan dari Kelurahan Palabuhan Ratu dan desa Citepus**, Perkebunan dari desa Citepus dan Citarik, serta pertanian tanaman kering dari Cidadap, dan lain-lain.
- Potensi sumber daya alam yang tidak dapat dibudidayakan berupa **berbagai macam obyek wisata pantai di Palabuhan Ratu dan Citepus**, goa di desa Citepus, dan lain-lain.

Dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Dati II Sukabumi seperti yang disebutkan diatas, maka semua kegiatan penting seperti : perdagangan dan jasa, industri, transportasi, dan fasilitas pelayanan umum berskala lokal berpusat di Palabuhan Ratu setelah Kota Sukabumi. Sebagai bahan perbandingan, jumlah sarana dan prasarana di Palabuhan Ratu lebih lengkap dibandingkan dengan Kecamatan Pabuaran, meskipun pada kenyataannya Pabuaran terletak di tengah-tengah wilayah Sukabumi.

Melihat data potensi dan perbandingan sarana prasarana, maka hal –hal seperti itulah yang menjadi faktor utama bagi penduduk untuk berurbanisasi ke Kota Palabuhan Ratu. Dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki Palabuhan Ratu, maka sangatlah relevan apabila pembangunan kantor Pemerintahan diprioritaskan di Palabuhan Ratu (jaraknya sekitar 61 Km dari Kotamadya Sukabumi), mengingat jaraknya dengan daerah terjauh dapat ditempuh dengan waktu hanya 2 jam saja.

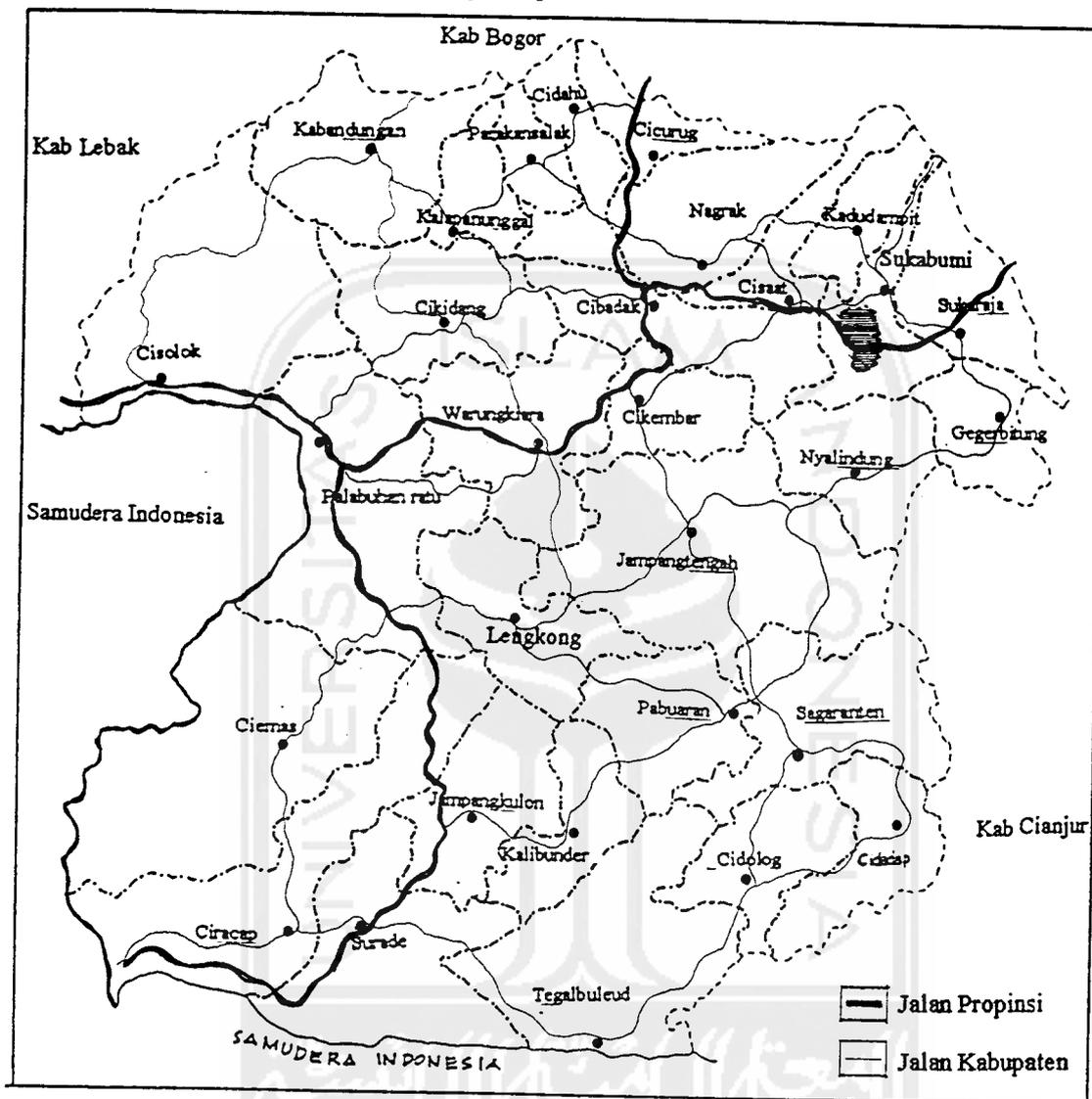
C. Jaringan Transportasi

Sistem transportasi antar dan intra wilayah yang ada di wilayah Sukabumi terdiri atas 2 jenis perangkutan yakni perangkutan jalan raya dan perangkutan rel kereta api. Khusus untuk perangkutan kereta api pada saat ini mempunyai frekwensi yang sangat kecil yakni untuk angkutan antar kota Bandung- Cianjur- Sukabumi- Bogor. Jumlah perjalanan antar wilayah/kota lebih banyak menggunakan jalan raya. Modus perangkutan jalan raya antar kota khususnya angkutan umum adalah dengan angkutan jenis bus dan bus tiga perempat.

Jaringan transportasi intra regional (di dalam wilayah) Sukabumi sendiri pada saat ini dapat dibagi atas tiga jalur jalan utama yang mengikuti jalur jalan Negara dan Propinsi, yaitu :

- a. Jalur antar kota Sukabumi - Cibadak - Cicurug
- b. Jalur antar kota Sukabumi - Cibadak - Palabuhan Ratu - Ciselok dan Palabuhan Ratu - Jampangkulon - Ujunggenteng
- c. Jalur antar kota Sukabumi – Sagaranten

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada peta berikut ini :



Gambar. 2.5. Peta jaringan transportasi Kab. Sukabumi, 1995.
Sumber : RUTRK Kab. Sukabumi, Thn 1995

2.1.3. Sistem Pelayanan Kantor Pemerintah Kab. Dati II Sukabumi ¹²

Kegiatan yang ada dalam kantor tersebut terbagi dalam dua bagian yakni: kegiatan pelayanan dan koordinasi. Secara garis besar, keseluruhan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat dibedakan menjadi :

1. Pelayanan Administrasi, yaitu pelayanan yang menyangkut segala usaha dan kegiatan ketata usahaan, pengelolaan kepegawaian dan keuangan yang pada dasarnya untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, baik langsung berhubungan maupun yang tidak langsung berhubungan (dalam hal ini urusan administratif).

¹² Sukabumi Mandiri, 1999.

2. Pelayanan Perencanaan, yaitu pelayanan yang menyangkut penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data yang diperlukan, menyusun rencana untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah, urusan pemerintahan umum dan menyusun program pelaksanaannya.
3. Pelayanan Pelaksanaan Pembangunan, yaitu pelayanan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan masyarakat misalnya pengarahannya, penyuluhan, pendidikan ataupun pelatihan, serta pelayanan yang menyangkut teknis perbaikan kebutuhan masyarakat.

Untuk pelayanan perijinan yang paling banyak berhubungan langsung dengan masyarakat masih menggunakan sistem tidak terpadu, yang berarti pelayanan perijinan masih ditangani oleh masing-masing bagian di Kantor Pemda maupun di kantor dinas-dinas yang terkait.

2.1.4. Pola Tata Ruang Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi

Gedung Sekretariat ini terletak di jalan R. Syamsudin, SH, yang pada awalnya merupakan bangunan kantor lama, yang kemudian beralih fungsi menjadi gedung Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Sukabumi. Karena mengalami beberapa perubahan baik dari segi kebutuhan jumlah ruang maupun dari besaran ruang berdasarkan susunan organisasi tata kerja di lingkungan sekretariat, maka bangunan ini mengalami perubahan secara bertahap dengan memanfaatkan lahan terbatas yang tersedia di belakang gedung lama.

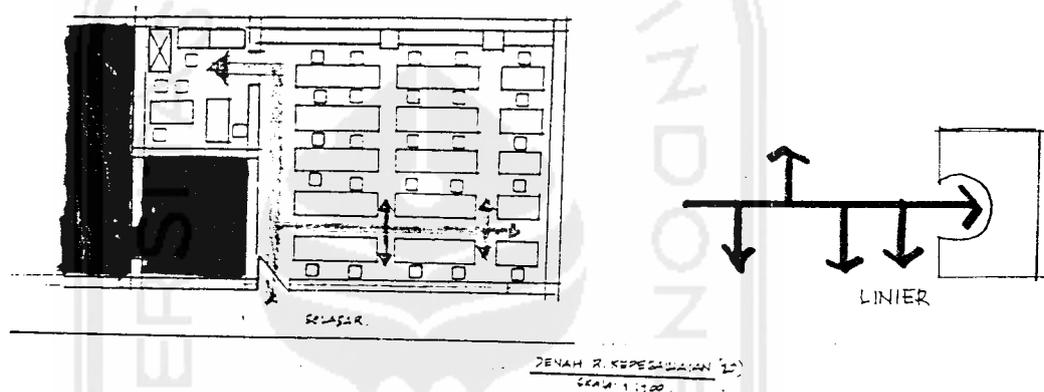
Bangunan lama, yang terletak di bagian depan, digunakan untuk ruang kantor yang membutuhkan privasi tinggi serta tidak terlalu banyak berhubungan dengan masyarakat langsung, juga ruang Bupati dan Kantor DPRD. Sedangkan gedung baru; yang ruang-ruangannya merupakan daerah publik; terdiri dari beberapa masa bangunan, dan salah satu dari masa itu terdiri dari 2 lantai yang sebagian ruangnya merupakan kantor DIPENDA Kab. Sukabumi.

Posisi bangunan baru itu menyebar dan menempati tapak sesuai dengan kontur awal dikarenakan kebutuhan mendesak. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 1.3. pada halaman 5. Selain itu sebenarnya Kabupaten Sukabumi memiliki bangunan pendopo, tetapi letaknya tidak berdekatan dengan gedung sekretariat atau kantor bupati, tetapi letaknya persis berdekatan dengan alun-alun. Dan alun-alun itu sendiri letaknya di jantung kota Sukabumi, yaitu sekitar jalan Perintis Kemerdekaan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 1.2 halaman 4 dan pada gambar tersebut juga dijelaskan juga bahwa lokasi kantor instansi-instansi pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi terpencar-pencar.

2.1.5. Pola Sirkulasi

A. Internal

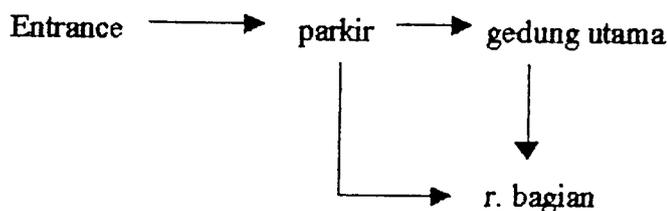
Sebenarnya pola sirkulasi yang terbentuk sangat sederhana sekali, ini diakibatkandari pola hubungan ruang yang sederhana pula. Namun kesederhanaan ini menjadi masalah ketika ruang penunjang yang mutlak dibutuhkan di tiap ruang bagian tidak tersedia. Seperti ruang tamu yang dibutuhkan tiap ruang bagian, apakah ukurannya kecil atau besar tetapi itu akan mempengaruhi pola sirkulasi. Dibawah ini adalah salah satu contoh denah ruangan salah satu bagian dan pola pergerakannya.



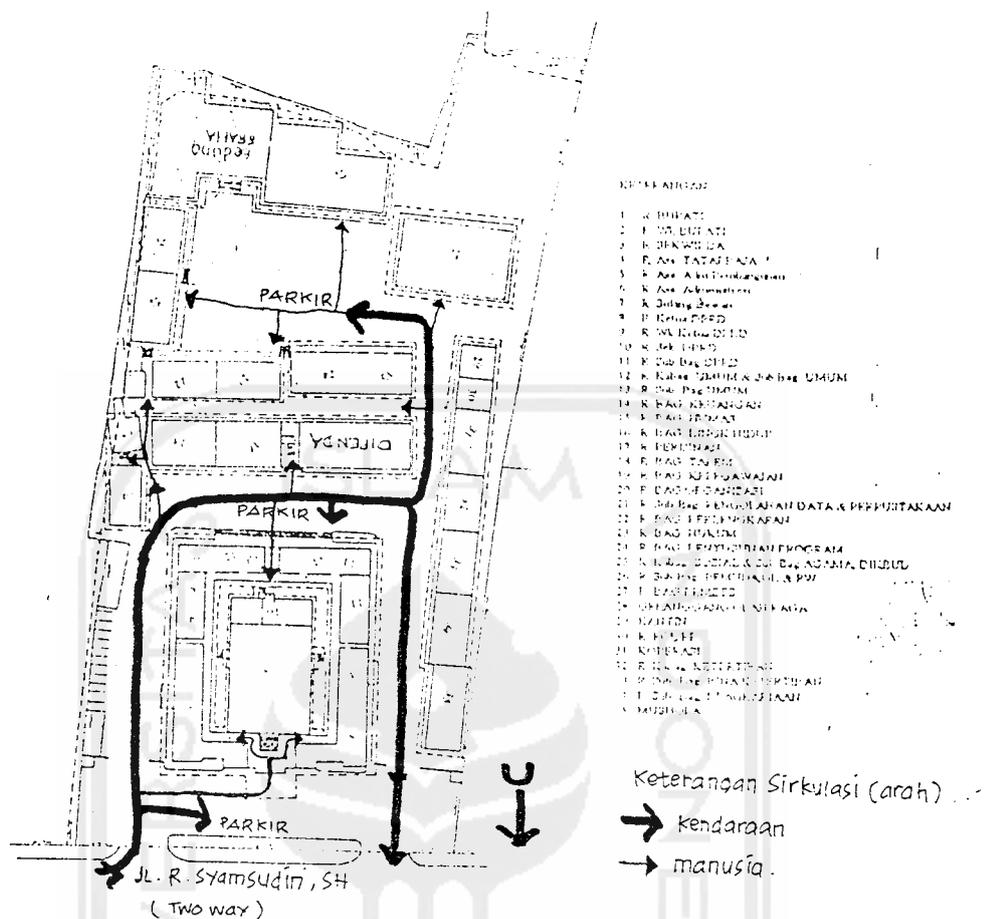
Gambar 2.6. Denah Ruang Bag. Kepegawaian & Pola Pergerakan
Sumber : Hasil Observasi Penulis, 1999.

B. Eksternal

Sedangkan untuk pola sirkulasi eksternalnya, sebenarnya sederhana , namun karena gedung ini terdiri dari beberapa masa dan tidak adanya kejelasan pola sirkulasi baik untuk masyarakat yang berkepentingan ataupun untuk pengguna gedung itu sendiri. Karena masih adanya kebingungan yang disebabkan karena menyebarnya beberapa ruangan bagian, sehingga pola sirkulasi menjadi tidak terarah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.7. Pola Organisasi ruang luar
Sumber : Hasil Observasi Penulis, 1999.



Gambar 2.8. Pola sirkulasi eksternal
 Sumber : Hasil Observasi Penulis, 1999.

Adanya beberapa kantong parkir yang merangkap ruang apel upacara, juga yang tidak dipertegas mana untuk roda 2 mana untuk roda 4, menyebabkan tidak beraturannya pola ruang sirkulasi.

2.2. Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman

2.2.1. Proyek Percontohan Otonomi Daerah di Sleman¹³

Pelaksanaan otonomi daerah di Daerah Tingkat II secara nyata direalisasikan melalui Instruksi Mendagri No 105 tanggal 3 Oktober 1994 yang secara tegas menetapkan 26 daerah Tingkat II menjadi pelaksanaan proyek percontohan Otonomi Daerah. Penunjukan tersebut berdasarkan pada hasil penelitian FISIPOL UGM dan Depdagri tentang kemampuan Daerah Tingkat II untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri pada tahun 1991. Daerah Tingkat II pelaksana proyek percontohan Otonomi Daerah merupakan daerah Tingkat II yang tersebar di 26 Propinsi di Indonesi, diantaranya Kabupaten Sleman, Propinsi DIY. Karena di

¹³ Pelaksanaan Otonomi Daerah di Daerah Tingkat II Sleman, 1999
 Tugas Akhir

Pulau Jawa ini yang termasuk otonomi percobaan adalah Kabupaten Sleman (DIY) dan Kabupaten Bandung (Jawa Barat), dengan segala keterbatasan maka penulis memutuskan untuk melakukan studi perbandingan di kabupaten yang terdekat dengan lokasi kegiatan, yaitu kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara prinsip pemberian otonomi pada daerah Tingkat II merupakan pembagian dan pemisahan fungsi lapisan pemerintahan. Pemerintah Daerah Tingkat II memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan dan tugas operasional, mengkoordinasikan pelaksanaan di lapangan dan melaksanakan kegiatan pelayanan pada masyarakat.

Salah satu dari tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dan itu terlihat dari keadaan sebelum proyek percontohan otonomi daerah dengan setelah otonomi daerah.

A. Keadaan Sebelum Percontohan Otonomi Daerah

1. Pembagian Urusan Pemerintahan

Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, Pemda Sleman mempunyai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebanyak 16 urusan, yaitu: umum, keuangan, pemerintahan, perburuhan, pertanian, perusahaan, perikanan, pertanahan, peternakan, Pdan K, kesehatan, LLAJ, sosial, PU, pariwisata dan distribusi.

2. Kelembagaan/ Organisasi

Unit pelaksana yang ada yaitu: Sekwilda (berikut asisten dan 14 bagian), Sekretariat DPRD, Bappeda, Dinas (6), BUMD (2), RSUD, Dekonsentrasi dibawah Depdagri (sospol, itwilkab, hansip, BP7, catatan Sipil, Pembangunan desa, 3 pembantu bupati, dan 17 kecamatan), Kandep (9)

3. Kepegawaian

Jumlah pegawai yang dikelola Pemerintah Daerah Tingkat II Sleman sebanyak 2.220 orang.

B. Keadaan Sesudah Otonomi Daerah

1. Pembagian Urusan Pemerintahan

Pemerintah daerah Tingkat II Sleman menerima sebagian urusan pemerintah menjadi sebanyak 25 bidang sebagian urusan.

2. Kelembagaan / Organisasi

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan untuk dikelola menjadi urusan rumah tangga daerah telah dibentuk 22 dinas.

3. Kepegawaian

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah ternyata menuntuk peningkatan aparat pemerintah daerah, baik secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah pegawai yang dikelola oleh pemerintah meningkat menjadi 9.107 orang, dan itu berarti meningkat sekitar 312% dari jumlah semula.

Keadaan tersebut memberikan dampak seperti berikut ini :

- semakin meningkatnya pelayanan pada masyarakat, proses pelayanan pada masyarakat menjadi lancar dan mudah.
- Meningkatnya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan daerah.
- Memberikan kemudahan kepada Kepala daerah dalam melaksanakan koordinasi, penawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemerintah daerah masyarakat untuk mengelola potensi daerah.
- Memberikan motivasi kerja dan pengembangan wawasan serta kreatifitas aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya.

Namun, ditengah-tengah kondisi yang positif tersebut, pelaksanaan proyek percontohan otonomi daerah di Daerah Tingkat II (khususnya Sleman) menemui beberapa kendala diantaranya yaitu masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah dan masih sangat terbatasnya kualitas SDM.

2.2.2. Deskripsi Wilayah Kabupaten Dati. II Sleman, Yogyakarta.

A. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Sleman adalah salah satu dari 5 Daerah Tingkat II di Propinsi DIY yang terletak di bagian Utara, berada di jalan perhubungan darat utama kota-kota besar di pulau Jawa bagian selatan, tepatnya diantara $107^{\circ} 15'$ dan $100^{\circ} 29'$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34'$ dan $7^{\circ} 47'$ Lintang Selatan.

Secara administratif kabupaten Daerah Tingkat II Sleman meliputi 3 wilayah pembantu bupati, 17 Kecamatan, dan 86 desa. Wilayahnya mencakup areal seluas $574,82 \text{ km}^2$ atau sekitar 18% dari luas Propinsi DIY ($3.185,80 \text{ km}^2$).

B. Topografi

Secara garis besar topografi wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Bagian Utara, merupakan perbukitan dengan lembah-lembah yang curam dengan kemiringan rata-rata 15 – 40%, mempunyai ketinggian antara 600 m- 1250 m di atas permukaan laut.
- b. Bagian Tengah, merupakan dataran dengan kemiringan berkisar 5- 10 %, mempunyai ketinggian 300 m di atas permukaan laut di bagian selatan, sampai dengan 500 m di atas permukaan laut di bagian utara.
- c. Bagian Selatan merupakan dataran dengan kemiringan < 5 % , ketinggian antara 100 – 200 m di atas permukaan laut.

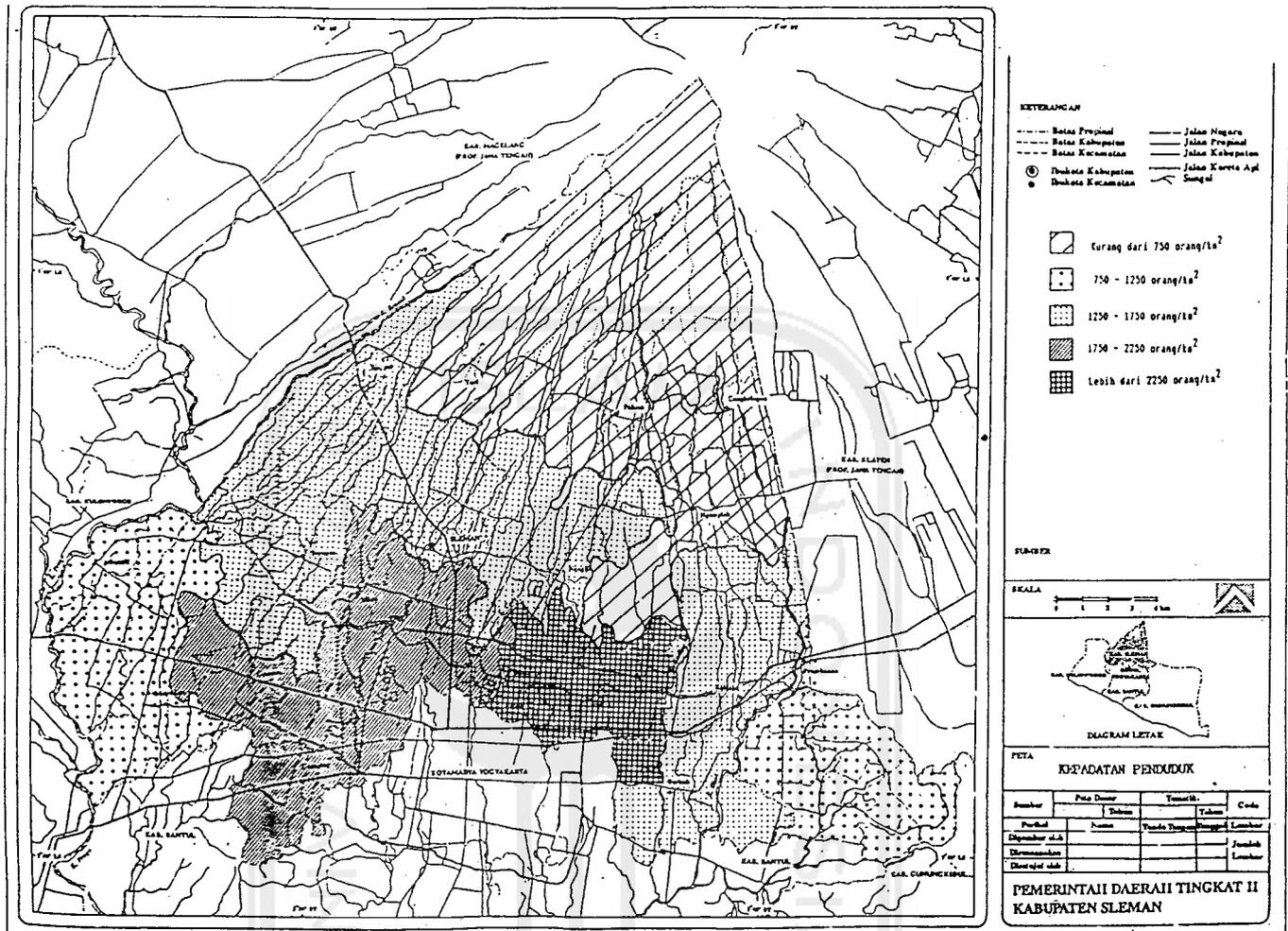
Secara umum, sebagian besar wilayah di Kabupaten Sleman merupakan dataran, hanya sebagian kecil, yaitu di bagian utara, merupakan lereng.

2.2.3. Kondisi Potensi Sleman

A. Sebaran Penduduk

Sesuai dengan registrasi penduduk pertengahan tahun 1997 jumlah penduduk sebanyak 819.800 jiwa, tingkat kepadatan rata-rata sebesar 1.426 jiwa/km dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Depok dan kepadatan terendah di kecamatan Cangkringan. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada peta kepadatan penduduk berikut ini:





Gambar 2.9. Peta sebaran penduduk Kab. Sleman, 1997.
Sumber : Data Mono grafi Kab. Sleman, 1997.

Dilihat dari tabel, tingkat sebaran penduduk cukup merata, dan 51,64% penduduknya tinggal di pedesaan, 48,36% penduduknya tinggal di desa “perkotaan”, dan sejak tahun 1989 , 85% dari semua desa telah berstatus desa Swasembada.

B. Potensi Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Sleman secara keseluruhan ditunjang oleh 8 sektor, yakni : pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan bahan galian, industri kerajinan, perdagangan, dan transportasi.

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat memberikan gambaran struktur ekonomi suatu daerah. Komposisi ini tergantung pada jenis mata pencaharian yang terdapat di daerah tersebut. Mata pencaharian terbanyak ada pada sektor pertanian, hal ini sesuai dengan

C. Jaringan Transportasi

Sistem transportasi antar dan intra wilayah yang ada di wilayah Sleman terdiri atas 2 jenis perangkutan yakni perangkutan darat dan udara. Jumlah perjalanan antar wilayah/kota lebih banyak menggunakan jalan raya. Modus perangkutan jalan raya antar kota khususnya angkutan umum adalah dengan angkutan jenis bus dan bus tiga perempat.

Jaringan transportasi intra regional (di dalam wilayah) Sukabumi sendiri pada saat ini dibagi dua jenis jalan, yakni :

a. Jalan Arteri Primer, yaitu :

- Jalan yang menghubungkan kota Yogyakarta ke Purworejo melalui Gamping, Sedayu, Sentolo, Wates dan Temon.
- Jalan yang menghubungkan kota Yogyakarta ke Surakarta melalui Kalasan, Prambanan.
- Jalan yang menghubungkan kota Yogyakarta ke Semarang melalui Sleman, Tempel.
- Jalan lingkaran Utara dan jalan Lingkaran Selatan Yogyakarta.

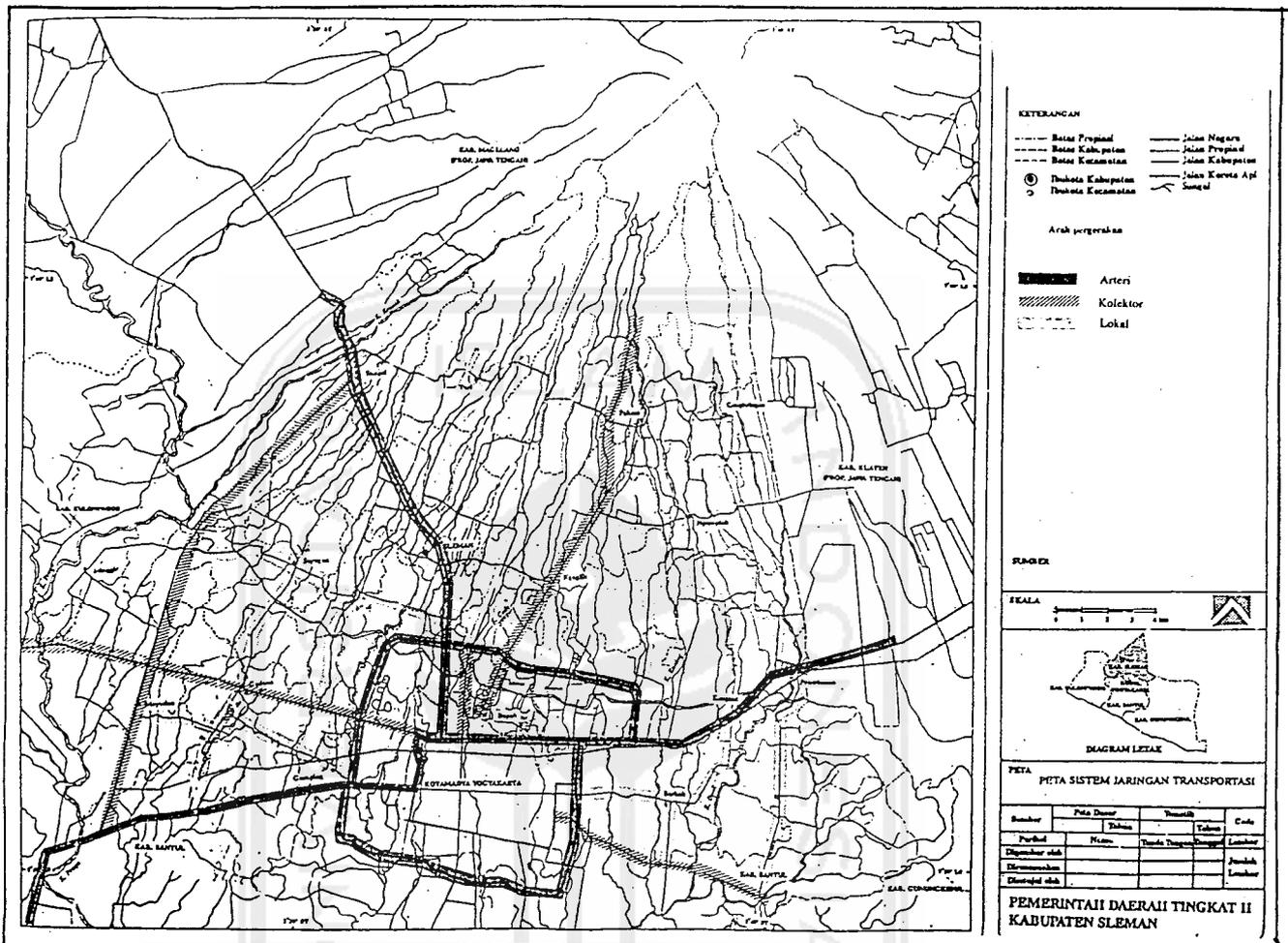
b. Jalan Kolektor Primer, yaitu :

- Jalan yang menghubungkan kota Yogyakarta ke Pakem melalui Depok, Ngaglik.
- Jalan yang menghubungkan kota Yogyakarta ke Kalibawang melalui Godean, moyudan, Nanggulan.
- Jalan yang menghubungkan kota Yogyakarta ke Wates melalui Bantul, Srandakan, galur, Panjatan.
- Jalan yang menghubungkan kota Yogyakarta ke Parangtritis melalui Sewon, Bantul, Pundong, Kretek.
- Jalan yang menghubungkan kota Yogyakarta ke Rongkop melalui Banguntapan, Piyungan, Patuk, Playen, Wonosari, Ponjong.

Agar tercapai keselarasan dan keserasian terciptanya mekanisme perekonomian di Kabupaten Sleman, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- Peningkatan status dan kualitas jalan pada ruas – ruas yang diperlukan
- Peningkatan kondisi jalan menuju ke obyek-obyek wisata.

Untuk lebih jelasnya jaringan transportasi di Kabupaten Dati II Sleman dapat dilihat pada peta berikut ini :



Gambar. 2.11. Peta jaringan transportasi Kab. Sleman, 1997
Sumber : Data Monografi Kab. Sleman, 1997.

2.2.4. Sistem Pelayanan Pada Kantor Pemerintah Kab. Dati II Sleman, Yogyakarta

Pelayanan yang diberikan oleh Kantor Setwilda Sleman sama dengan pelayanan yang diberikan pada kantor-kantor Setwilda pada umumnya. Namun sistem pelayanan yang diberikan oleh Setwilda Sleman berbeda, dan mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kehadiran Unit Pelayanan Terpadu Perijinan Satu Atap merupakan salah satu bagian dari pelayanan yang diberikan Setwilda Sleman yang mengalami perubahan. Pelayanan Administrasi lainnya tidak mengalami perubahan yang berarti.

Pelayanan Terpadu Perijinan Satu Atap merupakan salah satu sistem pelayanan untuk lebih menyederhanakan dan mengintensifkan pelayanan masyarakat dibidang perijinan, baik perijinan yang ditarik retribusi maupun perijinan yang tidak ditarik retribusi. Sebagai langkah awal jenis pelayanan yang ditangani oleh unit ini sebanyak 16 macam yang diselenggarakan oleh 6 instansi dan diharapkan di masa yang akan datang secara bertahap semua pelayanan perijinan

dapat disentralkan di Unit Pelayanan Terpadu Perijinan Satu Atap (UPTPSA) ini. Sistem dan prosedur kerja yang ada adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan perijinan melalui kelompok kerja UPTPSA sesuai dengan bidang perijinan masing-masing.
2. Kelompok kerja memeriksa kelengkapan persyaratan yang diajukan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam masing-masing jenis perijinan, dengan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan ijin.
3. Kelompok kerja melalui sekretariat UPTPSA menyampaikan berkas permohonan perijinan kepada masing-masing dinas/ unit kerja teknis. Berkas permohonan perijinan dikirim dengan surat pengantar dari UPTPSA, dan setelah diterima oleh dinas/unit kerja teknis diberi tanda bukti penerimaan.
4. Dinas/ unit kerja teknis memproses permohonan perijinan, dengan melalui tahap pemeriksaan berkas, cecking lokasi, evaluasi, penetapan biaya , dan pengesahan surat perijinan oleh pejabat yang berwenang.
5. Dinas/ unit kerja teknis menyampaikan surat perijinan kepada UPTPSA. Surat perijinan dikirim dengan surat pengantar dari dinas / unit kerja teknis dan setelah diterima oleh UPTPSA diberi tanda bukti penerimaan.
6. Sekretariat UPTPSA memberikan nomor register surat perijinan sebagai tanda bukti keabsahannya.
7. Sekretariat UPTPSA menyampaikan surat perijinan kepada loket pengambilan dengan tanda bukti penerimaan.
8. Loket penerbitan memberikan surat perijinan kepada pemohon setelah pemohon dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran atas biaya perijinan.

Untuk kelancaran kegiatan pelayanan di UPTPSA mengacu pada sendi- sendi :

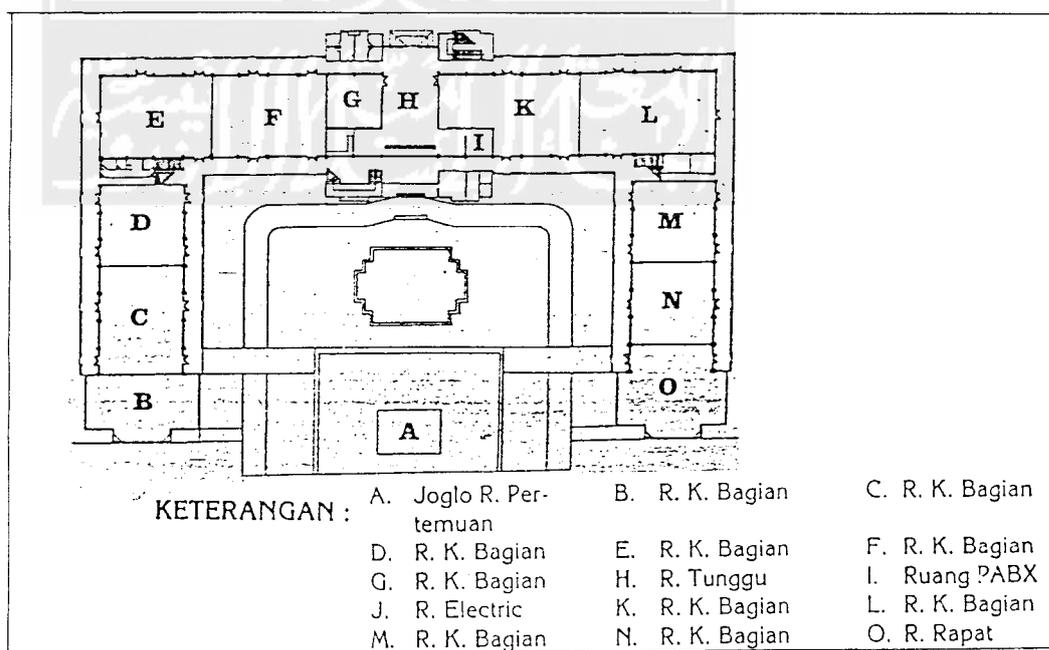
- **Kesederhanaan.** Prosedur pelayanan umum diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbeli-belit, mudah difahami dan mudah dilaksanakan.
- **Kejelasan dan Kepastian.** Adanya kejelasan dan kepastian tentang prosedur dan persyaratan pelayanan umum, rincian biaya, tata cara pembayarannya, waktu penyelesaiannya, unit kerja/ pejabat penanggung jawab dan lain-lain.
- **Keamanan.** Hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta memberikan kepastian hukum.

- **Keterbukaan.** Prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian, rincian biaya, unit kerja/ pejabat penanggung jawab, serta segala proses pelayanan dilakukan secara terbuka dan transparan.
- **Efisiensi.** Hanya dibutuhkan persyaratan pelayanan umum yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan, serta menghindari pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan.
- **Ekonomis.** Pengenaan biaya pelayanan umum ditetapkan secara wajar sesuai dengan nilai barang atau jasa pelayanan umum yang diberikan.
- **Keadilan.** Pelayanan umum diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil.
- **Ketepatan Waktu.** Pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Disamping kedelapan sendi tersebut, untuk lebih memberikan kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, maka UPTPSA juga mengacu pada perilaku petugas.

2.2.5. Pola Tata Ruang Kantor

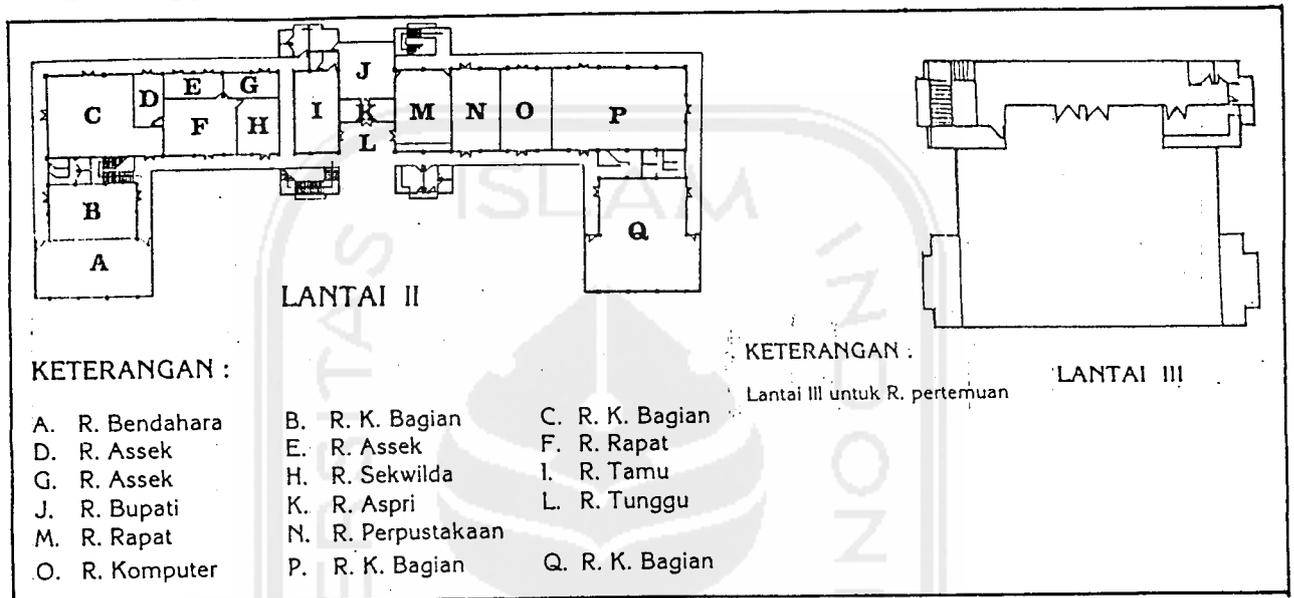
Gedung Sekretariat terletak di jalan Parasnya, dibangun terpadu 3 lantai dengan luas bangunan 3500 m², yang terdiri dari lantai I luasnya 1.660 m², lantai II 1.375m², lantai III 465m². Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.12. Denah Lantai 1

Sumber : Bag Humas Pemda Kab. Sleman, 1999.

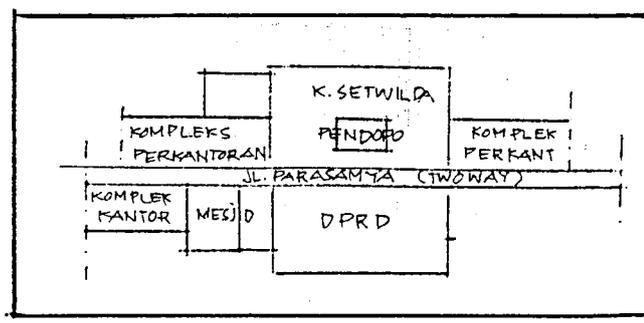
Lantai I merupakan daerah publik untuk melayani masyarakat, lantai II merupakan ruang perkantoran dengan kebutuhan privasi tinggi dan ruang Bupati ditempatkan pada tengah-tengah gedung sebagai *centre piece*, agar orientasi gedung menjadi lebih jelas. Lantai III dimanfaatkan sebagai ruang pertemuan besar.



Gambar 2.13. Denah Lantai 2 & 3
Sumber : Bag. Humas Pemda Kab. Sleman, 1999.

Sementara itu fungsi pendopo di bagian depan dimaksudkan sebagai ruang terbuka untuk menerima para tamu, dengan penekanan bahwa gedung ini bersikap terbuka kepada siapa saja. Gedung sekretariat ini juga memiliki keunikan tersendiri, yakni posisi Gedung Sekretariat yang menghadap gedung DPRD, yang memberikan arti bahwa jajaran aparat Pemda siap memperhatikan dan melaksanakan aspirasi rakyat yang di tampung melalui DPRD. Gedung ini juga menghadap salah satu tempat ibadah, dimaksudkan agar aparat pemerintah dalam bekerja senantiasa mengacu pada ajaran-ajaran agama.¹⁴

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



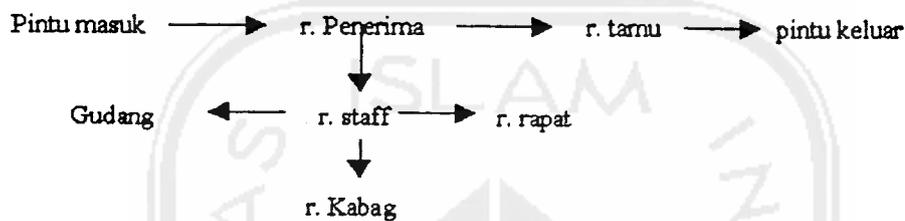
Gambar 2.14. Posisi kantor Setwilda Sleman

¹⁴ Brosur Grdng Setwilda Sleman, Humas Setwilda Sleman, 1999
Tugas Akhir
Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Sukabumi

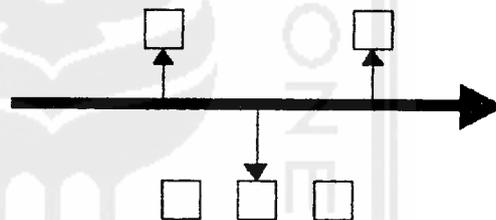
2.2.6. Sistem Sirkulasi

A. Internal

Konfigurasi bentuk sirkulasi pada bangunan setwilda bagian dalam (tiap ruang bagian) secara garis besar dikatakan linier. Itu disebabkan oleh pola organisasi ruang yang sederhana dan setiap ruang mempunyai dua pintu pada tiap 2 sisinya. Untuk lebih jelasnya lagi seperti pada gambar berikut:



Gambar 2.15. Pola Organisasi Ruang bagian
Sumber : Hasil Observasi Penulis,1999



Gambar. 2.16. Pola Sirkulasi Ruang bagian
Sumber : Analisa Penulis,1999

B. Eksternal

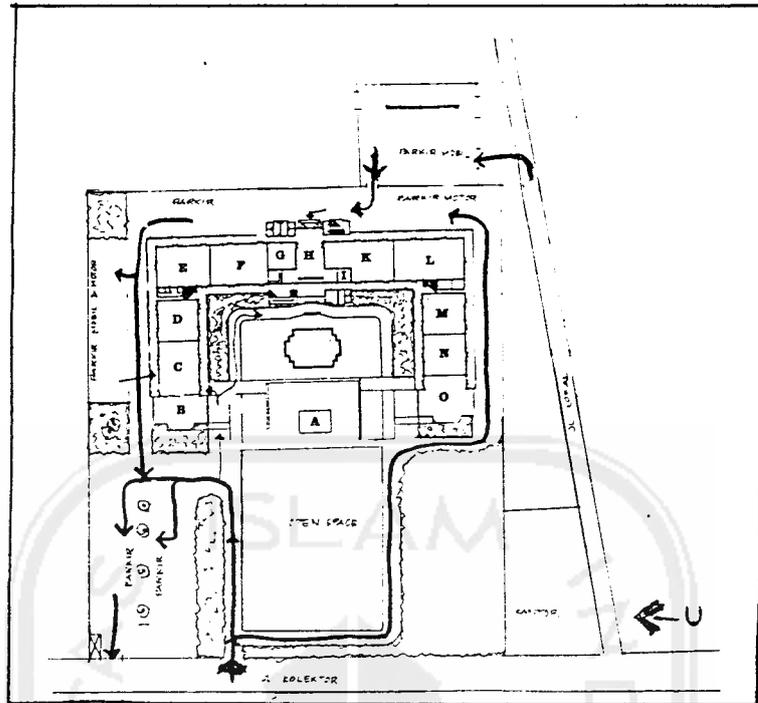
Pola sirkulasi eksternal atau sirkulasi dari luar gedung untuk semua pengguna pada umumnya berakhir sama yaitu pada ruangan yang dituju, hanya untuk kendaraan yang berakhir di kantong parkir.



Gambar.2.17. Organisasi ruang luar
Sumber : Analisa Penulis,1999.

Pencapaian ke bangunan dapat di tempuh melalui 2 arah , yaitu dari arah timur dan barat bangunan. Untuk dari arah barat (pintu utama) pencapaian secara tersamar karena jalur berkelok dan memperpanjang urutan pencapaian. Sedangkan untuk dari arah timur (pintu belakang) pencapaian langsung menuju gedung.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.18. Pola sirkulasi eksternal
Sumber : Analisa Penulis,1999

2.3.Studi Perbandingan Tentang Kantor Pemerintah Dati.II Pada Daerah Otonomi Percobaan

a. Lokasi

- Kedudukan ibukota Kab.dati II Sukabumi sekarang berada dalam 1 wilayah dengan kotamadya (Sukabumi bagian Utara) yang merupakan kawasan tumbuh cepat dan berada di kawasan kepadatan penduduknya tinggi, meskipun dari segi transportasi Sukabumi juga terletak pada jalur perhubungan darat utama Pulau Jawa bagian selatan.
- Kedudukan ibukota Kab. dati II Sleman berada pada kawasan penunjang kebutuhan yang dekat dengan kawasan tumbuh cepat, dan berada pada kawasan laju pertumbuhan penduduk sedang, walaupun demikian ibukota sleman ini terletak pada jalur perhubungan darat utama kota-kota besar Pulau Jawa bagian Selatan.

b. Sebaran Penduduk

- Sebaran penduduk di wilayah Kab.Sukabumi cenderung padat di bagian Utara. Hal itu disebabkan karena kurangnya pengendalian potensi dan pembangunan daerah dari pemerintahan sehingga kawasan yang padat semakin padat dan kawasan 'sepi' semakin tidak berkembang.
- Sebaran penduduk di wilayah kab sleman cenderung memusat di tengah, hal itu disebabkan karena daerah pinggir kabupaten merupakan kawasan kritis dan rawan bencana.

c. Potensi Ekonomi

- karena kab. sukabumi keadaan kepadatan penduduknya masih relatif jauh dibandingkan dengan Sleman menyebabkan laju perekonomian dirasakan berjalan lambat, tetapi pesat di daerah yang kepadatannya tinggi. Untuk itu daerah Palabuhan Ratu dengan tingkat kawasan penduduk 'sedang' mempunyai nilai lebih dibanding dengan wilayah lain di sukabumi, dan juga Palabuhan ratu adalah sebagai tiang pendukung perekonomian setelah kota Sukabumi.
- Keadaan kepadatan penduduk yang sesuai dengan mata pencahariannya akan mempengaruhi potensi ekonomi suatu daerah (wilayah Minggir). Pada Sleman , banyaknya penduduk pada kawasan pertanian menyebabkan potensi petanian pada daerah itu tumbuh cepat. Sedangkan daerah yang rawan kritis yang enduduknya sedikit tidak memfokuskan pada pertanian melainkan pada penggalian pasir dan batu sehingga masing-masing.

d. Pola Tata ruang,

- Pola Tata ruang kantor Setwilda Sukabumi sederhana terdiri dari bentuk linier, pola hubungan ruang-ruang yang bersebelahan dalam arti ruang-ruang itu (r. staff dan r Ka bag) berdiri sendiri di batasi oleh dinding dengan 1 pintu.
- Pola tata ruang Sleman, sederhana; berwujud U dan terdiri dari bentuk-bentuk linier;dengan pola hubungan ruang 'ruang di dalam ruang'. Dalam arti tiap ruangan bagian terdapat ruang-ruang penunjang yang fungsional dan sesuai dengan organisasi ruang.

e. Pola Sirkulasi

- Pola sirkulasi di kantor Setwilda Sukabumi memiliki konfigurasi bentuk jalan linier, tetapi karena bangunan kantor ini terdiri dari beberapa masa, maka tidak jarang membingungkan masyarakat / pengguna yang berkepentingan (tidak adanya papan petunjuk) sehingga pola sirkulasi menjadi menjadi terkesan radial (menyebar).
- Pola sirkulasi di kantor setwilda Sleman memiliki konfigurasi linier sedangkan hubungan ruang dan jalannya melewati ruang sehingga integritas ruang dapat dipertahankan.

2.4. Kesimpulan

Dari hasil analisis komparasi di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- Pemilihan lokasi tidak selalu harus berada di kawasan pertumbuhan cepat dengan perekonomian yang telah maju pesat, namun pemilihan lokasi pada kawasan penunjang pertumbuhan akan mendukung pemerataan pembangunan, serta diupayakannya jarak jangkauan pelayanan secara merata guna **mengoptimalkan pelayanan** pada masyarakat.
- Pola tata ruang ; yang sederhana dan sesuai dengan pola hubungan ruang dan organisasi ruang, akan **merepresentasikan keterpaduan pelayanan**. Yang dimaksud dengan sederhana disini adalah selain pola tata ruangnya memiliki bentuk yang beraturan, juga besaran ruang dan kelengkapan ruang penunjang disesuaikan dengan kebutuhan sesuai modul standar.
- Dengan sistem pelayanan yang sederhana (birokrasi tidak bertele-tele) otomatis akan didapatkan pola sirkulasi yang sederhana guna merepresentasikan keterpaduan pelayanan pada masyarakat. Jadi dengan kata lain sistem pelayanan akan mempengaruhi pola sirkulasi dalam bangunan kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II.